

# VISI MUHAMMAD YAMIN DAN SADARJOEN SISWOMARTOJO TENTANG PENTINGNYA PENDIDIKAN GURU TINGKAT UNIVERSITAS DI INDONESIA

Andi Suwirta \*)

## ABSTRACT

*This paper views educational thoughts stated by Muhammad Yamin and Sadarjoen Siswomartojo. Both figures are viewed as the founding fathers of UPI (Universitas Pendidikan Indonesia or Indonesia University of Education) in Bandung, which was established in 1954 and formerly named the PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru or Teacher Training College). By restating the thoughts of the two figures – visions, missions, and expectations – this paper attempts to give an emphasis on the crucial existence of the LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan or Teacher's Education Institution) as a facilitator to promote better education. Although UPI's in Bandung, it may play an important role as a comparison for other universities which are concerned with educators in Indonesia. Muhammad Yamin and Sadarjoen Siswomartojo stated that teacher's education in university level was needed to develop intellectuals with good moral ethics which was later viewed as the motivator to promote better education. The last section of this paper presents reflections: whether or not the existing LPTK-s in Indonesia are still consistent with the expectations of the founding fathers, i.e. the core of educational business is identity and potential that should be continuously developed in years to come. More than fifty years ago (1954), Muhammad Yamin and Sadarjoen Siswomartojo had this foreseeing vision that teacher's education in the university level is a necessity for the nation.*

**Key words:** *visions of Indonesian educational figures, the need of teacher's education in the university level, and self-reflection for LPTK in Indonesia.*

---

\*)**Drs. Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Dosen dan Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Lahir di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 9 Oktober 1962. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (Drs.) di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung tahun 1989; dan pendidikan S-2 (M.Hum.) di Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana UI (Universitas Indonesia) Jakarta tahun 1996, dengan menulis tesis – yang kemudian diterbitkan – tentang *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta), 1945-1947* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2000). Menulis beberapa buku, diantaranya adalah *Tasawuf dan Proses Islamisasi di Indonesia* (Bandung: Historia Utama Press, 2002). Untuk kepentingan akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat rumah: Komp. Vijaya Kusuma B.11 No.15-16 Cipadung, Cibiru, Bandung 40164, Jawa Barat. E-mail: [andisuwirta@yahoo.com](mailto:andisuwirta@yahoo.com)

## **Pengantar <sup>1</sup>**

Untuk apa sebuah perguruan tinggi didirikan? Pertanyaan provokatif dari Drost (1990), seorang ahli pendidikan, tersebut maksudnya adalah bahwa dalam mencermati sejarah perkembangan sebuah lembaga – termasuk perguruan tinggi – penting sekali untuk mengenali kembali visi, misi, dan cita-citanya semula agar ia tetap konsisten dan kontekstual dengan tantangan zaman. Keberadaan sebuah lembaga memang tidak hadir dalam ruang yang hampa. Konteks sosial dan tuntutan zaman harus diperhitungkan sebagai faktor-faktor determinan yang turut mempengaruhi lahirnya sebuah lembaga. Begitu juga dengan visi dan misi yang dicitacitakan oleh para penggagas dan pendiri lembaga tersebut turut memberikan arah dan pedoman ke mana ia harus diorientasikan. Dalam hal ini tidak terkecuali dengan lembaga yang bernama Perguruan Tinggi. Latar historis, konteks sosial, tuntutan zaman, dan visi dari para penggagas dan pendirinya perlu dilacak untuk melihat adanya proses kesinambungan (*continuity*) di satu sisi dan perubahan (*change*) di sisi lain dalam sejarah perkembangan lembaga tersebut.

Tulisan ini ingin melihat latar belakang didirikannya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Lembaga ini lahir pada tahun 1954 dan pada mulanya bernama PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru). Perkembangan lembaga ini pernah berubah dari PTPG menjadi FKIP (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan) sebagai bagian yang otonom dari UNPAD (Universitas Padjadjaran) Bandung pada tahun 1957, kemudian berubah lagi secara mandiri menjadi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Bandung pada tahun 1963, pada tahun 1999 berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan akhirnya pada tahun 2004 berubah menjadi UPI-BHMN (Badan Hukum Milik Negara).

Apa yang ingin ditekankan dalam tulisan ini adalah mengenali kembali visi dan misi yang digagas oleh para pendiri PTPG, yaitu Muhammad Yamin dan Mas Sadarjoen Siswomartojo. Kedua tokoh tersebut dikenang, oleh para civitas akademika sampai sekarang, sebagai Bapak Pendiri UPI (*The Founding Fathers of Indonesia University of Education*). Dengan melihat latar belakang sosial dari kedua tokoh tersebut juga diharapkan bisa difahami tentang konteks historis didirikannya PTPG pada masa-masa awal. Pada bagian akhir akan ditarik sebuah refleksi: apakah visi, misi, dan cita-cita dari kedua tokoh tersebut masih relevan dengan perkembangan dan kemajuan UPI sekarang.

---

<sup>1</sup>Tulisan ini, sebelum diubahsuai seperti dalam bentuknya sekarang, merupakan ringkasan hasil penelitian yang disponsori oleh IKA (Ikatan Alumni) UPI pada tahun 2003. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan IKA UPI pada waktu itu – terutama kepada Prof.Dr.H. Mohammad Fakry Gaffar, M.Ed. (Ketua Dewan Penasihat IKA UPI); Prof.Dr.H. Said Hamid Hasan, M.A. (Ketua Umum IKA UPI); dan Drs.H. Zulkabir (Sekretaris Jenderal IKA UPI) – yang telah memberikan bantuan untuk terwujudnya penelitian ini, betapapun seluruh hasil dan isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

### **Konteks Historis Kelahiran PTPG Bandung**

Salah satu tujuan utama sebuah perguruan tinggi didirikan – dimanapun dan kapanpun – adalah untuk membentuk kader-kader intelektual demi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi, dan demi pembangunan bangsa dan negara di sisi lain (Drost, 1990:7). Dan salah satu unsur dari civitas akademika perguruan tinggi tersebut, yaitu para mahasiswanya, juga dididik dengan maksud agar mereka menjadi manusia yang utuh dengan kualitas intelektual dan moral yang baik demi kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan manusia lainnya dalam lingkup profesi masing-masing. Tujuan yang masih umum ini tentu saja bisa dispesifikkan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi tersebut dalam konteks jiwa zaman dan tantangan sekitar.

Sejak awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan program Politik Etis (*Ethische Politiek*), minat masyarakat Indonesia pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memang cukup besar. Namun minat yang cukup besar itu tidak dibarengi oleh kesempatan yang luas dan terbuka mengingat sistem pendidikan kolonial Belanda yang masih bersifat elitis dan diskriminatif. Lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah seperti HIS (*Hollandsch Inlandsche School*, Sekolah Dasar Bumiputera); MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*, Sekolah Menengah Tingkat Pertama); dan AMS (*Algemeene Middelbare School*, Sekolah Menengah Atas), misalnya, didirikan di kota-kota penting di Indonesia. Begitu juga dengan pendidikan kejuruan seperti untuk pamongpraja (MOSVIA, *Middelbare Opleidings School Voor Inlandsche Ambtenaren*), sekolah dagang (MHS, *Middelbare Handels School*), sekolah pertanian (MLS, *Middelbare Landbouw School*), dan kedokteran (STOVIA, *School Ter Opleiding Van Indische Artsen*). Pada tahun 1920-an sekolah tinggi teknik (THS, *Technische Hooge School*) di Bandung dan sekolah tinggi hukum (RHS, *Rechts Hooge School*) di Jakarta juga didirikan (Brugmans, 1938:289-357). Betapapun pada zaman sebelum Indonesia merdeka sudah ada sekolah untuk pendidikan guru (HKS, *Hoogere Kweek School*), namun belum ada pendidikan guru untuk tingkat universitas.

Karena itu setelah Indonesia merdeka, usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan mulai digalakkan. Lebih-lebih karena periode tahun 1950-an, sebagaimana sering dikemukakan, adalah menggejalanya euforia yang ditandai oleh harapan-harapan dan optimisme berlebih ketika revolusi Indonesia baru saja berakhir dengan kemenangan (Abdullah, 2001). Semangat nasionalisme dan idealisme yang tinggi serta cita-cita sosial yang besar untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa merupakan wacana yang menggejala secara luas. Bagaimana mengisi, membangun, dan memberi makna pada kemerdekaan yang baru saja dimenangkan, dengan demikian, merupakan aspirasi sosial yang dominan sesuai tuntutan zaman.

Adalah Mr. Muhammad Yamin, sebagai Menteri PP dan K (Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan) pada masa Kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo, yang terobsesi untuk mendirikan sebuah pendidikan guru tingkat universitas yang akan digembleng dan dipersiapkan – sebagaimana sering dikatakan – sebagai “benih-benih generasi muda yang akan membangun dan mencerdaskan bangsa di masa depan” (Wawancara dengan Ismaun, 24/3/2002). Untuk merealisasikan obsesi dan cita-citanya itu maka pada tahun 1954 didirikanlah PTPG yang bersifat nasional, masing-masing di Bandung, Jawa Barat; di Malang, Jawa Timur; di Batusangkar, Sumatera Barat; dan di Tondano, Sulawesi Utara. Tentang kehadiran PTPG ini dalam konteks masyarakat Indonesia tahun 1950-an, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

PTPG yang berdiri ditahun 1954 itu merupakan langkah maju dalam dunia pendidikan Indonesia. Karena dengan demikian maka untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki lembaga pendidikan Guru yang bertaraf Perguruan Tinggi. [...] Suatu hal yang setjara tersirat menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada suatu tingkat kemadjuan yang sedemikian hingga dengan sadar mengakui jabatan Guru sebagai suatu jabatan yang menuntut pendidikan universitas (Rifai *et al.*, 1965:97-98).

Dalam hal ini ada baiknya melihat saat-saat penting tentang sejarah didirikannya PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) di Bandung – yang sekarang menjadi UPI (Universitas Pendidikan Indonesia). PTPG di Bandung didirikan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1954. Peresmian pendirian PTPG dihadiri oleh banyak orang. Sebagaimana dicatat oleh Harian Umum *Pikiran Rakjat* di Bandung bahwa yang hadir dalam acara peresmian pembukaan PTPG itu antara lain: Menteri PP dan K, Mr. Muhammad Yamin; Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Mohammad Hassan; Menteri Negara, Rooseno; Dekan PTPG, Dr.M. Sadarjoen Siswomartojo; Sekjen Kementerian PP dan K, M. Hutasoit; Sekjen Kementerian Agama, Kafrawi; Kepala Pengajaran Pusat Kementerian PP dan K, Sugarda; para pejabat UNESCO Jakarta; Gubernur Jawa Barat; semua Residen, Bupati, dan Walikota dari seluruh Jawa Barat (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954). Kehadiran para pejabat – baik dari Pusat maupun Daerah – dalam acara peresmian pembukaan PTPG di tengah-tengah sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan karyawan) itu menunjukkan besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap kelahiran lembaga penghasil guru, tenaga kependidikan, dan pendidikan profesional lainnya ini.

Dalam acara peresmian pembukaan PTPG itu yang turut memberikan sambutan adalah: Walikota Bandung, Enoeh; Dekan PTPG, Dr.M. Sadarjoen Siswomartojo; Gubernur Jawa Barat; Menteri PUT, Mohammad Hassan; Kepala Pengajaran Pusat, Sugarda; dan Menteri PP dan K, Mr. Muhammad Yamin. Acara pembukaan dan sambutan diadakan di gedung PTPG “Bumi Siliwangi” (bekas Villa Isola), yang sekarang terkenal dengan nama gedung

“Partere Bumi Siliwangi”, di halaman selatan. Setelah upacara pembukaan selesai, para undangan diajak untuk menuju arah utara gedung “Bumi Siliwangi” untuk menyaksikan peresmian prasasti pendirian PTPG dari Perdana Menteri RI, Mr. Ali Sastroamidjojo; dan penanaman pohon beringin yang dilakukan oleh Ibu Mr. Muhammad Yamin. Prasasti dan pohon beringin itu kini masih kukuh berdiri.

Dalam sambutannya, Dr.M. Sadarjoen Siswomartojo (Dekan PTPG) antara lain menyatakan bahwa PTPG mempunyai fungsi untuk “*memberi penjegaran dan daja hidup baru pada alam sekitarnja untuk ikut serta melangsungkan dan memperkembangkan hidupnja kebudajaan*” (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954). Pernyataan ini mengandung makna yang luas dan menjadi tantangan PTPG pada masa-masa awal berdirinya di tengah-tengah masyarakat. Agar lembaga ini bisa eksis dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka seyogianya seluruh sivitas akademika PTPG menyadari tugas berat yang akan dihadapi ke depan. Karena itu Dr.M. Sadarjoen Siswomartojo berpesan agar para dosen, mahasiswa, dan karyawan PTPG Bandung memiliki integritas pribadi dan akademik yang baik, “*di atas alas jang kokoh, jaitu dasar2 filosofis-didaktis, psikologis-metodis sesuai dengan fungsi sosial-pedagogis dari seorang guru*” (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954).

Sementara itu Mr. Muhammad Yamin (Menteri PP dan K) dalam sambutannya mengatakan bahwa didirikannya empat PTPG di Indonesia – selain di Bandung, Jawa Barat; juga di Malang, Jawa Timur; Batu Sangkar, Sumatera Barat; dan Tondano, Sulawesi Utara – adalah untuk memenuhi kebutuhan negara akan “*tenaga pengadjar jang berpendidikan universitas dan mempunjai wewenang penuh untuk mengadjar pada sekolah landjutan tingkat atas*” (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954). Eksistensi dan fungsi PTPG yang pada awalnya nampak sederhana ini sesungguhnya karena dilandasi oleh pengalaman dan kenyataan yang tak terbantahkan bahwa untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan menengah di Indonesia maka harus dipersiapkan pula kualitas tenaga pendidikannya. Dan adalah kenyataan pula bahwa sampai dengan Indonesia merdeka tahun 1950-an belum ada perguruan tinggi yang khusus mempersiapkan tenaga pendidik yang bermutu dan profesional di bidangnya. Karena itu setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950-an mulai dipikirkan untuk mendirikan PTPG sebagai pendidikan guru tingkat universitas. Meminjam kata-katanya Dr.M. Sadarjoen Siswomartojo – yang masih diingat oleh mantan para mahasiswanya – kalau untuk hewan saja ada perguruan tingginya, apalagi untuk mendidik manusia (Wawancara dengan Zulkabir, 15/6/2002).

Urgensi dan esensi pendirian PTPG, dengan demikian, sangat jelas karena menyangkut pembinaan kualitas pribadi dan karakter manusia Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses *national and character building* setelah masyarakat Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Sebagai perguruan tinggi yang hirau pada pembinaan

SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia masa depan, tidaklah mengherankan kalau PTPG tidak kecap dari kebijakan politik pendidikan pemerintah, dari dahulu sampai sekarang.

### **Visi Muhammad Yamin**

Visi berkaitan erat dengan kemampuan untuk memandang dalam konteks horizon yang jauh ke depan. Visi juga berkaitan dengan kemauan untuk memberikan nilai-nilai dan kepercayaan yang benar dalam konteks dan cara pandang yang menjadi pilihannya itu. Visi, dengan demikian, harus dimiliki dan menjadi *conditio sine qua non* sebuah lembaga dan atau organisasi yang ingin eksis dan diakui kiprahnya dalam masyarakat yang perkembangannya semakin ditandai oleh kemajuan dan kemodernan. Visi, pada gilirannya, menuntut adanya inovasi, kreativitas, tekad, semangat, dan etos kerja yang keras dari para pimpinan dan anggota sebuah lembaga dan atau organisasi itu sehingga posisi dan peranannya tetap diakui, relevan, dan fungsional dalam lintas zaman. Pada akhirnya visi itu sering digambarkan sebagai wawasan yang bersifat visioner dan strategis ke depan dan biasanya ia tumbuh dan berkembang atas dasar pengalaman kelampauan, cita-cita, tekad dan tantangan kekinian, serta harapan-harapan dan prediksi yang jelas ke depan (Gaffar, 1994:5-7).

Namun, visi sebuah lembaga atau institusi juga tidak bisa dilepaskan dari pribadi-pribadi pemimpin yang turut mewarnai corak pemikiran, kebijakan, dan peran lembaga bersangkutan. Hal ini tidak hanya berlaku di lembaga pendidikan tinggi, di lembaga-lembaga pemerintahan, pers, hukum, dan kebudayaan pun visi dan kompetensi pribadi pimpinan turut memberikan arah dan kebijakan ke mana lembaga yang dipimpinnya akan dibawa (Suwirta, 2004). Lagi pula visi dan kompetensi pribadi itu merupakan produk dari perkembangan pribadi seseorang dan pengaruh dari lingkungan sosial yang mengitarinya. Karena itu menjadi relevan di sini dalam kerangka memahami visi Mr. Muhammad Yamin sebagai Menteri PP dan K tentang PTPG dengan cara dilihat pula sejarah perjalanan hidupnya yang kaya dan menarik itu di satu sisi, dan di sisi lain lingkungan sosial yang membentuknya.

Mr. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat, pada tanggal 23 Agustus 1903. Saat menjabat sebagai Menteri PP dan K dan memprakarsai pendirian PTPG, dengan demikian, usianya 51 tahun. Pendidikan dasar (VS dan HIS) dan menengah (NS, LVS, dan AMS) dilaluinya di Padang, Bogor, dan Yogyakarta. Sedangkan gelar sarjana hukum (*Meester in de Rechten*) diselesaikannya di Jakarta pada tahun 1932. Sejak zaman pergerakan nasional, ia aktif dalam berbagai kegiatan: mula-mula di *Jong Sumatranen Bond* (1916-18); organisasi Indonesia Muda (1928); Partai Indonesia (Partindo, 1932-38); dan Partai Persatuan Indonesia (Parpindo, 1938-142). Ia juga memiliki talenta di bidang sastra, sejarah, dan drama. Pernah menjadi advokat dan anggota *Volksraad*

(Dewan Rakyat) pada zaman Belanda (Gunseikanbu, 1986:472). Gagasan dan pengalamannya di bidang pendidikan pada zaman pergerakan adalah bahwa ia terlibat dalam pendirian Perguruan Rakyat, sebuah sekolah yang mengusung cita-cita dan program pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi, semangat kebangsaan dan kemerdekaan, serta mencintai tanah air dan bangsanya. Sekolah yang didirikan oleh Muhammad Yamin ini pada zaman pergerakan nasional bisa disejajarkan dengan sekolah-sekolah seperti *Ksatryian Instituut* di Bandung yang dipimpin oleh Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudhi); Taman Siswa di Yogyakarta yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara (Suwardi Surjaningrat); dan INS Kayu Tanam di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Mohammad Sjafei. Sekolah-sekolah seperti itu selain memiliki visi dan misi pendidikan, juga memiliki cita-cita politik masa depan (Lee Kam Hing, 1995:19).

Memasuki zaman Jepang (1942-45), Muhammad Yamin aktif dalam Majelis Pertimbangan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), organisasi massa buatan Jepang; dan menjadi penasihat badan propaganda Jepang (*Sendenbu-Sedenka*). Menjelang Indonesia merdeka, ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI yang merumuskan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Mr. Muhammad Yamin, dengan demikian, termasuk salah seorang *the founding father of Indonesia*, di samping Soekarno dan Mohamad Hatta. Memasuki masa revolusi Indonesia (1945-50) ia aktif berjuang, bersama-sama dengan para lasykar rakyat dan tentara Indonesia, di daerah Karawang-Bekasi; mendukung organisasi PP (Persatuan Perjuangan) pimpinan Tan Malaka yang menuntut Indonesia merdeka 100%; dan karenanya turut melibatkan diri dalam Peristiwa 3 Juli 1946, suatu percobaan kudeta pertama, dan ditujukan kepada PM Sjahrir, yang gagal dalam sejarah Indonesia. Pada masa revolusi Indonesia, Mr. Muhammad Yamin sering digambarkan sebagai seorang pribadi yang “warna-warni” ideologi dan orientasi politiknya. Minat dan perhatiannya terhadap sastra, hukum, dan juga pendidikan tetap tinggi (Anderson, 1988).

Setelah Indonesia merdeka, pada masa kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo (1953-1955), Muhammad Yamin dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri PP dan K. Pada saat ia menjabat sebagai Menteri PP dan K inilah gagasan untuk mendirikan PTPG di Indonesia berhasil direalisasikan. Ia meresmikan langsung berdirinya PTPG di Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1954, yang sekarang menjadi hari Diesnatalis UPI secara resmi. Minatnya terhadap sastra, sejarah, hukum, dan politik ditunjukkannya dengan menjabat pula sebagai Ketua Jurusan Sejarah Budaya pertama di PTPG Bandung sampai dengan wafatnya tahun 1962 (Zainul & Saripudin eds., 2004). Dalam acara Kongres Nasional Sejarah I tahun 1957 di Yogyakarta, ia menggagas paradigma perlunya penulisan sejarah yang Indonesia-sentris. Makalahnya tentang “Catur Sila Khaldunyah” dalam kongres para sejarawan pertama di Indonesia itu mengundang perdebatan yang seru dan

menandai babak baru tentang penulisan sejarah nasional Indonesia yang bercorak *view from within* (Notosusanto & Puspongoro eds., 1988). Para sejarawan akademis Indonesia menamakan paradigma penulisan sejarah Indonesia-sentris yang sarat dengan perspektif ideologis-politis ini dengan “mahzab Yaminisme” (Abdullah, 2001).

Ketika memberikan sambutan dan meresmikan pendirian PTPG di Bandung inilah – dalam kapasitasnya sebagai Menteri PP dan K – visinya tentang “pendidikan guru tingkat universitas” dapat dikemukakan dengan jelas. Menurut Mr. Muhammad Yamin, dengan telah tercapainya kemerdekaan Indonesia maka rasa haus dan dahaga masyarakat Indonesia terhadap pendidikan menjadi luar biasa. Ia kemudian menjelaskan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia itu, termasuk juga proses pendidikan di PTPG Bandung, adalah:

[...] untuk membentuk manusia susila yang tjakap dan warga negara bangsa beradab yang demokratis serta bertanggung djawab atas kesedjahteraan masjarakat dan tanah air. Di samping pembinaan achlak untuk mentjapai kekuatan moril yang tinggi, perlu diusahakan sebaiknja usaha2 untuk mentjapai kepandaian dan ketjerdasan yang akan mendjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan tjita2 kebudayaan umumnja yang bersifat nasional (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954).

Jika dielaborasi dan dikaitkan dengan konteks kekinian, maka visi Mr. Muhammad Yamin tentang pendidikan itu tetap relevan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia sekarang di mana dimensi-dimensi kualitas pribadi dan sosial yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, cakap, terampil, dan beradab dalam koteks negara kebangsaan Indonesia yang maju, sejahtera, bermartabat, dan merdeka di tengah pergaulan antar bangsa dalam dunia internasional yang kompleks dan modern.

Proses pendidikan itu, menurut Mr. Muhammad Yamin, hendaknya dirancang untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Dan PTPG di Bandung, yang dipandanginya sebagai “pendidikan guru tingkat universitas”, hendaknya merupakan usaha untuk membentuk angkatan baru yang kuat dan mempunyai kemampuan untuk mendukung kejayaan negara. Karena itu di akhir sambutannya dalam meresmikan pembukaan PTPG di Bandung, Mr. Muhammad Yamin membacakan puisi tentang “Bumi Siliwangi” dengan gaya *soneta*-nya yang terkenal itu sebagai berikut:

Dari bumi indah dan permai  
Waktu siang pembukaan raya  
Tampak Parahiangan bergunung sungai  
Dipagari bukit dataran bertjahaja.

Waktu kelam ditinggalkan matahari  
Kemarin malam pernah kemari  
Sinar seminar di kaki bumi  
Mandi cahaja lampu berseri.

Siang malam meriah melimpah

Bumi Siliwangi landjutan sedjarah  
Di tengah alam gembira meriah.

Wahai pemuda harapan bangsa  
Menuntut ilmu radjinlah senantiasa  
Agar nanti menjulahi masa (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954)

Kalimat terakhir dari *soneta*-nya Mr. Muhammad Yamin itu jelas sekali sasarannya, yakni ditujukan kepada para pemuda dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di PTPG dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia agar tetap rajin, tekun, dan bekerja keras dalam menuntut ilmu supaya pada saatnya nanti menjadi generasi-generasi yang menerangi dan mencerahkan masyarakat sesuai dengan tuntutan dan jiwa zaman (*menyulahi masa*).

Mr. Muhammad Yamin memang tidak lama menjabat sebagai Menteri PP dan K. Sistem Demokrasi Liberal yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-an memang merupakan suatu pengalaman pemerintahan demokratis yang penuh dengan “kemelut”, yang menjadikan pemerintahan datang dan pergi silih berganti (Compton, 1993:42-43). Kabinet pimpinan PM Mr. Ali Sastroamidjojo – dimana Mr. Muhammad Yamin dipercaya sebagai Menteri PP dan K – pada tahun 1955 digantikan oleh kabinet PM Burhanuddin Harahap. Muhammad Yamin sendiri kemudian tetap menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah Budaya di PTPG Bandung; dan pada tahun 1960-an juga dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjabat Ketua Deppernas (Dewan Perancang Pembangunan Nasional). Sampai wafatnya di tahun 1962, perhatian Mr. Muhammad Yamin (yang sudah menjadi Profesor dan Haji itu) terhadap pendidikan, sejarah, sastra, hukum, dan politik tetap tidak berubah. Dan ketika PTPG mau diubah menjadi bagian dari FKIP UNPAD pada tahun 1957, Mr. Muhammad Yamin termasuk yang menentangnya dengan alasan akan mereduksi visi dan misi PTPG ketika didirikan pada tahun 1954 (Wawancara dengan Asmawi Zainul, 5/7/2003); betapapun yang menjadi Presiden (kini Rektor) UNPAD pertama itu adalah sahabat karibnya sendiri, yakni Prof.Mr. Iwa Kusumasumantri (Lubis, 2002).

### **Visi Mas Sadarjoen Siswomartojo**

Jika Mr. Muhammad Yamin adalah penggagas dan pemrakarsa berdirinya PTPG di Indonesia, maka Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo adalah Dekan pertama dan pelaksana sebenarnya dari lembaga PTPG di Bandung itu. Namun keduanya, dalam memori kolektif sivitas akademika UPI sampai kini, dipandang sebagai *the founding fathers* PTPG pada saat didirikan tahun 1954. Berbeda dengan Mr. Muhammad Yamin yang pribadinya warna-warni (ahli hukum yang meminati sastra, sejarah, politik, dan pendidikan), maka Dr.M. Sadarjoen Siswomartojo barangkali adalah seorang pendidik dan akademisi yang kurang tertarik pada masalah-masalah

politik. Hal itu bisa dilihat dari sejarah perjalanan hidup, riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta visinya tentang PTPG pada tahun 1950-an.

Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo dilahirkan di Boyolali, Jawa Tengah, pada tanggal 20 September 1906. Pada saat menjadi Dekan PTPG di Bandung, dengan demikian, usianya mencapai 48 tahun. Pendidikan dasar (HIS) dan menengah (HKS) dilaluinya di daerah Yogyakarta, masing-masing pada tahun 1920 dan 1927. Pada waktu menempuh pendidikan di HKS (*Hollands Kweek School*) atau Sekolah Pendidikan Guru, ia giat dan meminati bidang organisasi, olahraga, dan musik. Bekal dan pengalaman di tiga bidang yang ditekuninya sejak masa muda itu akan bermanfaat saat ia dipercaya untuk memimpin PTPG di Bandung dan dikenang oleh para sivitas akademiknya sebagai seorang pimpinan perguruan tinggi yang berbadan atletis, berwibawa, dan mahir memainkan alat musik biola (Wawancara dengan Syamsul Hadi Senen, 15/6/2002).

Pengalaman dan karier pekerjaan Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo juga benar-benar di sekitar dunia pendidikan dan guru. Pada zaman kolonial Belanda, setelah tamat dari HKS ia bekerja berpindah-pindah. Mula-mula sebagai guru HIS di Mojokerto, Jawa Timur (1927); guru MULO di Purwokerto (1929-30); Kepala Sekolah HIS di Purwodadi, Jawa Tengah (1933-34); Kepala Sekolah HIS di Majalengka, Jawa Barat (1935-38); dan jabatan terakhir sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah Inspektur Olahraga (1938-40).

Aktivitasnya pada zaman Jepang (1942-45) tidak banyak diketahui. Namun sebagaimana umumnya orang Indonesia (Anderson, 1988), ia juga diduga bekerjasama dengan pemerintah militer Jepang itu dan meneruskan bidang yang ditekuni selama ini: pendidikan, olahraga, dan musik. Baru pada masa revolusi Indonesia (1945-50), aktivitas Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo muncul kembali. Mula-mula ia dipercaya untuk memimpin Balai Pustaka, setelah diambil alih dari pemerintah militer Jepang, di Jakarta; kemudian menjadi pegawai Kantor Pemerintah RI di Yogyakarta sambil merangkap sebagai Inspektur Umum Pendidikan Jasmani dan Kepala Bagian Alat-alat pada Kementerian PP dan K (1946-49). Pada masa akhir revolusi Indonesia, ia dipercaya sebagai Kepala Perwakilan Kementerian PP dan K RI Jakarta yang pada masa itu masih diduduki oleh Belanda (Ekadjati & Sjamsuddin, 1983/84:66-78). Pengalamannya bekerja dari satu lembaga ke lembaga lain dan selalu berpindah-pindah ini penting untuk memantapkan dirinya sebagai pendidik dan pekerja yang tekun untuk kemajuan masyarakat.

Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo memang termasuk seorang pendidik dan pekerja yang tekun. Untuk meningkatkan kualitas diri dan kualifikasi pendidikannya ia tidak puas hanya berbekal izajah HKS. Beberapa kursus dan pendidikan singkat ditempuhnya seperti: mengikuti pendidikan di Sekolah Olahraga (1928-30); dan di Sekolah *Hoofd Akte* (1931-33), keduanya di Jakarta. Bekal pendidikan dan pengalamannya itu

penting untuk memahami mengapa pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian PP dan K, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950-an mempercayakan kepada Dr.M. Sadarjoen Siswomartojo untuk menjabat sebagai Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat (1951) di satu sisi, dan di sisi lain menjadi Dekan PTPG di Bandung (1954-1957). Di lembaga terakhir inilah ia dikukuhkan sebagai Doktor HC (*Honoris Causa*) dalam bidang Ilmu Pendidikan Masyarakat (Ekadjati & Sjamsuddin, 1983/84:66-78).

Bagaimana visi Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo tentang PTPG? Dalam pidato dalam rangka peresmian pembukaan PTPG di Bandung pada tanggal 20 Oktober 1954, ia antara lain mengemukakan tentang fungsi dan eksistensi lembaga yang baru dipimpinnya itu, yakni:

Fungsi Perguruan Tinggi di tengah2 masyarakat adalah sebagai suatu lembaga masyarakat dengan para sardjana dan ahlinja, maka PTPG mempunyai fungsi *untuk memberi penjebaran dan daja hidup baru pada alam sekitarnja untuk ikut serta melangsungkan dan memperkembangkan hidupnja kebudajaan*. [...] Tinggi-rendahnja suatu Perguruan Tinggi bergantung pada penerimaan masyarakat sendiri jang terikat pada nilai2 sosial dan ukuran ahlak serta filsafat hidup jang berlaku dalam masyarakat (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954).

Fungsi PTPG pada awal berdirinya agar “*memberi penjebaran dan daja hidup baru pada alam sekitarnja untuk ikut serta melangsungkan dan memperkembangkan hidupnja kebudajaan*” itu penting disadari oleh semua sivitas akademika, terutama para mahasiswa dan dosen. Sebab, menurut Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo, para mahasiswa harus sadar bahwa setelah belajar di ruang kuliah dan di perpustakaan, serta membaca beribu-ribu buku maka mereka itu nantinya harus dapat dengan cakap mengamalkan kembali pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam masyarakat ramai. Mahasiswa harus selalu berhubungan dan bergerak bersama-sama masyarakat, sebab kalau tidak – menurutnya – maka “*Perguruan Tinggi akan mendjadi satu pasilan jang sekalipun nampak tetap tumbuh, namun berarti akan terus mendjauh dan merugikan masyarakat sekelilingnja*” (*Pikiran Rakjat*, 21/10/54). Sedangkan kepada para dosen diingatkannya agar menjadi fasilitator dan mitra mahasiswa yang sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberi daya hidup baru dan penyegaran pemikiran dalam masyarakat. Atas dasar itu, menurut Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo:

Sejogianja para pengadjar pada Perguruan Tinggi tsb. dapat menentukan sikap dan tjara2 mengadjar jang tepat. Jaitu pembentukan jang semata2 akademis, di atas alas jang kokoh, jaitu dasar2 filosofis-didaktis, psikologis-metodis sesuai dengan fungsi sosial-pedagogis dari seorang guru (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1954).

Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo menjabat sebagai Dekan PTPG sampai dengan tahun 1957. Sebab sejak tanggal 24 September 1957 PTPG berubah menjadi FKIP dan menjadi bagian dari fakultas UNPAD yang baru didirikan

oleh Prof. Mr. Iwa Kusumasumantri (Lubis, 2002). Berbeda dengan Mr. Muhammad Yamin – sebagaimana telah dikemukakan di muka – yang tidak setuju dengan perubahan PTPG menjadi FKIP, Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo termasuk yang menyetujuinya dan ia tetap diangkat sebagai Dekan FKIP sampai dengan tahun 1961.

Dalam sebuah acara Diesnatalis PTPG ke-3 tahun 1957, sekaligus sebagai awal berdirinya FKIP, dan dihadiri oleh Panglima TT III, Kolonel Kosasih; Gubernur Jawa Barat, R. Ipik Gandamana; para wakil berbagai jawatan, para mahaguru dan dosen UNPAD, serta para mahasiswa FKIP, Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo mengemukakan alasan perubahan PTPG menjadi FKIP dan bergabung dengan UNPAD:

Perubahan ini telah diikrarkan oleh Dewan Dosen PTPG pada tanggal 29 Juni 1957 yang antara lain berbunyi: "... menyetujui penggabungan PTPG Bandung dalam Universitas Padjadjaran, sebagai suatu fakultas yang penuh dengan otonomi yang seluas-luasnya dalam perkembangannya dan pertumbuhannya sesuai dengan azas, dasar, dan tujuan sesuatu PTPG" (*Pikiran Rakjat*, 21/10/1957).

Perubahan PTPG menjadi FKIP pada tahun 1957 sebagai "*fakultas yang penuh dengan otonomi seluas-luasnya ... sesuai dengan azas, dasar, dan tujuan sesuatu PTPG*" itu dibuktikan paling tidak dalam tiga hal. *Pertama*, pusat pendidikan FKIP tetap berada di bekas PTPG, yakni gedung "Bumi Siliwangi" di Jalan Raya Lembang-Bandung (sekarang Jl. Dr. Setiabudi No. 229), bukan di Jalan Dipati Ukur, tempat UNPAD berdiri bersama-sama dengan Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Publisistik. *Kedua*, hari ulang tahun (dies natalis) FKIP tetap tanggal 20 Oktober, hari berdirinya PTPG, bukan tanggal 24 September, hari berdirinya UNPAD. Dan *ketiga*, visi dan misi FKIP sebagai lembaga pendidikan yang bersifat nasional tidak mengalami perubahan, termasuk kebebasan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo memang rajin menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan, baik pada waktu menjabat sebagai Dekan PTPG maupun sebagai Dekan FKIP. Pada tahun 1956, misalnya, dalam kapasitasnya sebagai Dekan PTPG ia mengunjungi negara-negara Australia, New Zealand, Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Perancis, India, Jepang, Belanda, Swiss, Italia, Turki, dan Thailand untuk mempelajari dan menjalin kerjasama tentang pendidikan guru di negara-negara tersebut. Dan pada tahun 1961, dalam kapasitasnya sebagai Dekan FKIP, ia mengunjungi kembali negara Amerika Serikat dan Jepang dalam rangka kerjasama dengan Ford Foundation. Tujuannya adalah untuk mengadakan penelitian mengenai pengembangan dan pendidikan mahasiswa di dua negara tersebut (Ekadjati & Sjamsuddin, 1983/84:71-2).

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Dekan PTPG (1954-57) dan Dekan FKIP (1957-61), Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo dikukuhkan sebagai Guru Besar pada tahun 1962 dan sejak itu diperbantukan pada MIPI (Majelis Ilmu

Pengetahuan Indonesia), sekarang LIPI, sebagai Direktur LEKNAS (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional). Namun perhatiannya terhadap dunia pendidikan tidak ditinggalkan. Bahkan pandangannya tentang lembaga pendidikan, seperti IKIP, menjadi rujukan banyak orang. Tidak kurang dari Rektor IKIP Bandung yang pertama (1963-1966), Prof.Dr.H. Roeslan Abdulgani, acapkali mensitir pandangan Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo tentang “apa dan bagaimana” IKIP itu (Sjamsuddin & Zulkabir eds., 2004).

Pada tanggal 30 April 1977, satu setengah bulan sebelum wafat, ia sempat melakukan orasi ilmiah tentang “Beberapa Renungan Mengenai Pendidikan Guru di Indonesia” dan dikukuhkan sebagai *Doctor Honoris Causa* (Doktor Kehormatan) oleh IKIP Bandung, lembaga yang pernah dipimpinnya ketika masih bernama PTPG (1954-57) dan FKIP (1957-61). Betapapun refleksi pemikirannya bersifat *post power vision*, dalam artian ketika ia sudah sepuh dan tidak lagi menjabat sebagai pimpinan IKIP Bandung pada tahun 1977, namun ada baiknya dikemukakan visinya tentang pendidikan, terutama tentang tugas utama lembaga pendidikan guru seperti IKIP Bandung (kini Universitas Pendidikan Indonesia). Menurut Prof.Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo:

[...] tugas utama lembaga pendidikan guru ialah menjadikan lembaga itu suatu persemiaan yang subur untuk menghasilkan guru-guru yang mempunyai ciri-ciri: berbudi pekerti luhur, berkepribadian tangguh, memiliki keuletan dalam berusaha, berani dalam menghadapi kesulitan, berani memperjuangkan cita-cita yang ia yakini akan kebenarannya, dan kemampuan berbuat dalam menciptakan hal-hal yang baru yang lebih baik daripada yang diciptakan oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Di samping itu ia harus pula menjadi pengabdikan masyarakat yang berdedikasi tinggi (Ekadjati & Sjamsuddin, 1983/84:72-3).

Prof.Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1977, dalam usia 71 tahun. Visi, refleksi pemikiran, pengalaman, dan dedikasinya di bidang pendidikan telah menjadi “berita pikiran” (*discourse*) dan “tindakan sosial” (*social action*) tersendiri yang turut mewarnai corak perkembangan sejarah lembaga ini, baik ketika masih bernama PTPG dan FKIP maupun IKIP Bandung. Di kalangan masyarakat akademisi Perguruan Tinggi, ia dikenal sebagai peletak dasar Ilmu Pendidikan Masyarakat dan penggagas – kemudian menjadi kenyataan – pada masa Orde Baru adanya program BUTSI (Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia) dan KKN (Kuliah Kerja Nyata) sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Ekadjati & Sjamsuddin, 1983/84:74). Di kalangan sivitas akademikan UPI sendiri, Prof.Dr. Mas Sadarjoen Siswomartojo dikenang sebagai seorang tokoh dengan sosok penampilan yang tetap atletis, berwibawa secara akademik, tidak berpolitik praktis, dan menyenangkan permainan musik biola pada saat-saat acara kekeluargaan di lembaga yang pernah dipimpinnya itu.

## **Penutup**

UPI di tahun 2006 ini – menapaki usianya yang lebih dari setengah abad – tentu saja sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat. Jika pada masa awal berdirinya tahun 1954 lembaga ini hanya memiliki 215 mahasiswa dan tersebar di 5 Jurusan: (1) Jurusan Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Jasmani; (2) Jurusan Bahasa dan Kesusastraan Indonesia dan Inggris; (3) Jurusan Sejarah Budaya; (4) Jurusan Pasti Alam; dan (5) Jurusan Ekonomi dan Hukum Negara (Sjamsuddin & Zulkabir eds., 2004); maka kini UPI telah memiliki jumlah mahasiswa 28.003 orang yang tersebar di lebih dari 50 Jurusan dan Program Studi dalam lingkungan 6 Fakultas dan 1 Sekolah Pasca Sarjana, serta di UPI Kampus-kampus Daerah (Kartadinata *et al.*, 2006:17). Jika pada awal didirikannya UPI hanya memiliki tenaga dosen tidak lebih dari 100 orang, kini UPI telah memiliki tenaga dosen 1.305 orang. Alumni UPI, sejak meluluskan Sarjana Muda (B.A.) tahun 1957 dan Sarjana Pendidikan (Drs.) tahun 1959 sampai dengan lulusan bulan Oktober 2006 sekarang telah mencapai lebih dari 100.000 orang (Wawancara dengan Shofjan Taftazani, 20/8/2006). Mereka, para alumni UPI itu, tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia, dengan tetap menekuni profesi kependidikan sebagai pilihan dan karier hidupnya, walaupun tidak jarang juga ada alumni yang berkiprah di bidang non kependidikan. Kampus UPI juga terus berkembang. Jika pada awal berdirinya hanya menggunakan Gedung Partere “Bumi Siliwangi” sebagai pusat kegiatan pendidikan (kini gedung tersebut merupakan Kantor Rektorat), maka UPI sekarang dikenal sebagai lembaga pendidikan dengan sistem multi kampus. Kampus UPI tersebar di Serang, Purwakarta, Cibiru, Sumedang, dan Tasikmalaya, dengan pusatnya tetap di kampus utama Bumi Siliwangi. Di kampus utama sendiri sekarang tengah dibangun gedung-gedung baru dan fasilitas modern lainnya dengan bantuan dari IDB (*Islamic Development Bank*).

Memasuki awal abad ke-21 ini UPI juga mengalami fase penting dalam sejarahnya, yakni berubah status menjadi perguruan tinggi yang ber-BHMN (Badan Hukum Milik Negara) sejak tahun 2004. Pilihan perubahan status ini juga bukan perkara yang mudah. Sebagaimana perubahan PTPG menjadi FKIP tahun 1957, perubahan FKIP menjadi IKIP Bandung tahun 1963, dan perubahan IKIP Bandung menjadi UPI tahun 1999, maka perubahan UPI menjadi PT yang ber-BHMN tahun 2004 juga mengalami perdebatan yang seru dan pertentangan kepentingan yang tajam. Namun jika perspektif sosiologis dan analogi sejarah boleh digunakan, maka pertentangan dan konflik kepentingan itu hendaknya dimaknai sebagai medium dan katalisator bagi terciptanya dinamika perubahan, kemajuan, dan kohesi sosial. Dinamika perubahan itu nampaknya juga tetap dalam konteks kesinambungan, bahwa jatidiri dan identitas UPI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tetap *concern* dalam bidang pendidikan merupakan

pilihan untuk mewarisi dan mengapresiasi visi dan misi yang telah dikemukakan oleh para pendiri UPI.

Pertanyaanya sekarang adalah apakah LPTK (Lembaga Pendidikan Lembaga Kependidikan) seperti UPI dan eks IKIP lainnya di Indonesia yang telah berubah menjadi “Universitas-universitas Negeri” itu masih tetap konsisten (*istiqomah*) dengan cita-cita para pendiri lembaganya semula? Apakah mereka masih menyadari bahwa *core* bisnis atau visi dan misi utamanya adalah pendidikan sebagai jatidiri dan potensi yang seharusnya terus dikembangkan dimasa-masa yang akan datang? Yang harus disadari dan diyakini betul adalah lebih dari lima puluh tahun yang lalu (1954), Muhammad Yamin dan Sadarjoen Siswomartojo sudah memiliki visi dengan wawasan jauh ke depan, bahwa pendidikan guru tingkat universitas adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Dan UPI di Bandung nampaknya adalah universitas yang masih konsisten dengan visi dan misi yang digagas oleh para *the founding fathers* LPTK tersebut (Kartadinata, 2006).

Akhirnya sebuah analogi dapat dikemukakan di sini, bahwa kapal yang bernama UPI dengan bendera BHMN-nya itu kini tengah berlayar mengarungi samudera luas untuk menuju pelabuhan yang dicita-citakan. Tentu saja dalam perjalannya itu akan menghadapi riak gelombang, batu karang, dan mungkin juga badai yang besar. Hanya nahkoda yang unggul, terpercaya, punya visi yang cerdas dan bijak ke depan – dengan dibekali oleh kompas perjalanan dan perangkat pelayaran lain, serta dibarengi oleh dukungan dan optimisme awak kapalnya – maka Insya Allah pelabuhan yang dicita-citakan itu akan menjadi kenyataan. Karena itu, salah satu agenda penting bagi UPI ke depan adalah bagaimana civitas akademika UPI, mulai dari pimpinan universitas sampai dengan Jurusan/Program Studi, berjuang secara kolaboratif dan sinergis agar lembaga ini – sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejarahnya yang panjang – tetap eksis, maju, modern, dan berwibawa tidak hanya dalam lingkup regional dan nasional, tetapi juga dalam konteks persaingan global (Sjamsuddin & Zulkabir eds., 2004).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (2001). *Nasionalisme & Sejarah*. Bandung: CV Satya Historika.
- Anderson, Ben. (1988). *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Berita “Dies Natalis ke III P.T.P.G., ‘Hak Swatjipta’ Harus Dimiliki Perguruan Tinggi, P.T.P.G. Djadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan” dalam *Pikiran Rakjat*. Bandung: 21 Oktober 1957.
- Berita “Pembukaan gedung Perguruan Tinggi Pendidikan Guru ‘Bumi Siliwangi’” dalam *Pikiran Rakjat*. Bandung: 21 Oktober 1954.

- Brugmans, I.J. (1938). *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. Groningen-Batavia: Bij J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V..
- Compton, Boyd R. (1993). *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Drost, J. (1990). "Untuk Apa Perguruan Tinggi Didirikan?" dalam *Prisma*, No.1. Jakarta: LP3ES.
- Ekadjati, Edi S. & Helius Sjamsuddin. (1983/1984). *Biografi Nasional: Guru Besar-Guru Besar Perguruan Tinggi di Jawa Barat*. Jakarta: Proyek IDSN, Ditjarahnitra, Depdikbud RI.
- Gaffar, Muhammad Fakry. (1994). "Visi: Suatu Inovasi dalam Manajemen Strategik Perguruan Tinggi". *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*. Bandung: IKIP Bandung, 17 Oktober.
- Gunseikanbu. (1986). *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartadinata, Sunaryo. (2006). "Transformasi UPI-BHMN: Fokus, Strategi, dan Tantangan". *Pidato Rektor* pada Dies Natalis ke-52 Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: UPI Press, 20 Oktober.
- Kartadinata, Sunaryo *et al.* (2006). *Laporan Perkembangan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2006: A Leading and Outstanding University*. Bandung: UPI Press.
- Lee Kam Hing. (1995). *Education and Politics in Indonesia, 1945-1965*. Kuala Lumpur, Malaysia: University of Malaya Press.
- Lubis, Nina Herlina. (2002). *Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah: Biografi Mr. Iwa Kusumasumantri*. Bandung: Satya Historika.
- Notosusanto, Nugroho & Marwati Djoened Puspongoro eds.. (1988). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: PN Balai Pustaka dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, edisi revisi.
- Rifai, Bachtiar *et al.* (1965). *Perguruan Tinggi di Indonesia*. Djakarta: Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI.
- Sjamsuddin, Helius & Zulkabir eds.. (2004). *Membangun Pendidikan Guru Tingkat Universitas: Pemikiran Pendidikan dari Mas Sadarjoen Siswomartojo Hingga Muhammad Fakry Gaffar, 1954-2004*. Bandung: UPI Press bekerjasama dengan IKA UPI.
- Suwirta, Andi. (2000). *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta), 1945-1947*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Suwirta, Andi. (2004). "Atang Ruswita, Pikiran Rakyat, dan Kritik Sosial" dalam Asmawi Zainul & Didin Saripudin [eds.]. *50 Tahun Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 1954-2004: Mozaik Pemikiran tentang Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Budaya*. Bandung: Historia Utama Press.
- Zainul, Asmawi & Didin Saripudin eds.. (2004). *50 Tahun Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 1954-2004: Mozaik Pemikiran tentang Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Budaya*. Bandung: Historia Utama Press.

## **Wawancara:**

- Asmawi Zainul, Prof.,Dr.,H.,M.Ed. (mahasiswa FKIP-UNPAD Bandung tahun 1958, kini Guru Besar di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI), pada tanggal 5 Juli 2003.
- Ismaun, Prof.,Dr.,H.,M.Pd. (asisten Prof.Mr.H. Muhammad Yamin pada tahun 1950/1960-an, kini sebagai Guru Besar di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI), pada tanggal 24 Maret 2002 di Bandung.
- Shofjan Taftazani, Drs.H.,M.Pd. (dosen Jurusan Bahasa Arab FPBS UPI, kini Ketua Umum IKA UPI), pada tanggal 20 Agustus 2006 di Bandung.
- Syamsul Hadi Senen, Drs.,H.,M.M. (mahasiswa IKIP Bandung tahun 1974, kini Dosen di Jurusan Pendidikan Ekonomi FPIPS UPI), pada tanggal 15 Juni 2002 di Bandung.
- Zulkabir, Drs.,H. (mahasiswa FKIP UNPAD Bandung tahun 1961, kini dosen purnabhakti di Jurusan Pendidikan Elektro FPTK UPI), pada tanggal 15 Juni 2002 di Bandung.

*Tulisan ini membahas tentang pemikiran pendidikan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan Sadarjoen Siswomartojo. Kedua tokoh tersebut dipandang sebagai the founding fathers UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, yang pada waktu didirikan tahun 1954 bernama PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru). Dengan mengemukakan kembali pemikiran kedua tokoh tersebut – berupa visi, misi, dan cita-cita yang diharapkan – tulisan ini ingin memberikan penekanan betapa tetap penting dan relevan hadirnya lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai*

*medium untuk mencerdaskan bangsa. Betapapun kasusnya adalah UPI, tetapi penting sebagai bahan komparasi bagi universitas-universitas lain yang memiliki kepedulian terhadap tenaga kependidikan di Indonesia. Dalam pandangan Muhammad Yamin dan Sadarjoen Siswomartojo pendidikan guru tingkat universitas itu diperlukan di Indonesia untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal, cakap, susila yang pada gilirannya akan menjadi penggerak dan obor bagi pencerdasan kehidupan bangsa. Pada bagian akhir akan dilakukan refleksi: apakah LPTK yang ada di Indonesia sekarang ini masih tetap konsisten (istiqomah) dengan cita-cita para pendiri lembaganya semula, yakni bahwa core bisnis pendidikan merupakan jatidiri dan potensi yang seharusnya terus dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Lima puluh tahun yang lalu (1954), Muhammad Yamin dan Sadarjoen Siswomartojo sudah memiliki visi dengan wawasan jauh ke depan bahwa pendidikan guru tingkat universitas adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia.*

**Kata-kata kunci:** *visi tokoh pendidikan Indonesia, perlunya pendidikan guru tingkat universitas, dan refleksi diri badi LPTK di Indonesia.*